

Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) - Baru

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
3	Site Plan	Wajib
4	Sertifikat Tanah	Wajib
5	Surat Cek PL / Advice Planning	Wajib
6	Dokumen Andalalin	Wajib
7	Surat Permohonan Persetujuan Andalalin yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas bermaterai Rp. 6.000	Wajib
8	Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA)	Wajib
9	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Wajib
10	Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi Akta Notaris Pendirian Dan Perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada	Wajib
11	Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : Kemenkumham, jika PT dan Yayasan, Kementerian, jika Koperasi, Pengadilan Negeri, jika CV.	Wajib
12	Scan Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan	Wajib
13	Gambar Rencana Grand Desain Bangunan	Wajib
14	Scan NPWP Direktur	Wajib
15	Buku Kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Permen Perhubungan RI No. 75 tahun 2015)	Wajib
16	Sertifikat dari Konsultan/Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Andalalin yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan	Wajib
17	Surat Penunjukan Tugas dari Perusahaan Konsultan kepada perwakilan yang namanya tertera pada Sertifikasi Konsultan Andalalin	Wajib
18	Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan yang telah didaftarkan dan disahkan (Waarmerking) oleh Notaris	Wajib
19	Foto copy Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi BKPRD	Wajib
20	Draft Gambar Arsitektur Kota (KRK/RTL/Blokplain/Gambar Arsitektur) bagian Site Plan dan Tabel Intensitas Bangunan bagi Rencana Pembangunan Baru Dan Bagi Pengembangan/Sudah Terbangun Lampirkan Yang Sudah Definitif Atau Disahkan Oleh Instasi Terkait	Wajib
21	Fotocopy Fatwa Planologi	Wajib
22	Soft copy KRK/RTL/Blokplain/Gambar Arsitektur dalam format Auto Cad berbentuk CD	Wajib
23	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (unuk kegiatan tang memiliki luas tanah >5000 m ²) bagi kegiatan pengembangan dan sudah terbangun/beroperasi	Wajib

Dasar Hukum :

--	--

No	Dasar Hukum
1	Undang-undnag Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
4	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6	Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00
2	5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00